

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie

sri_rahayu@uwks.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, juga diharapkan arah dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dapat sejalan dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

Metode analisis yang digunakan ini adalah perspektif analisis kemiskinan non-konsumsi pada indikator-indikator yang menjadi determinan terhadap kondisi kemiskinan konsumsi di Kabupaten Probolinggo berupa analisis posisi relatif dan analisis perkembangan antar waktu terhadap indikator utama pada bidang kemiskinan non-konsumsi, serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian indikator terhadap perkembangan di tingkat provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dapat ditentukan indikator-indikator yang akan menjadi prioritas / focus dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dirangkum dalam tabel berikut.

Hasil Penelitian ini yaitu anjuran agar semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan semakin ditingkatkan, demikian juga kemitraan antar Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam suksesnya penerapan Strategi Penanggulangan Kemiskinan ini, dan sekaligus untuk pencapaian tujuan pembangunan millenium. Dan tidak kalah pentingnya, untuk dapat melakukan analisis kondisi/capaian indikator-indikator yang menjadi determinan kondisi kemiskinan sehingga diperoleh hasil pemetaan prioritas bidang intervensi dan penetapan prioritas wilayah intervensi dengan tepat, maka pemenuhan data dan informasi terkait pada seluruh kecamatan menjadi suatu keniscayaan dan senantiasa ter *up date*.

Kata kunci : Kemiskinan, SDG's, Kebijakan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya (inter locking), dan angka-angka kemiskinanpun telah menjadi salah satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi setiap bangsa dan pemerintahan. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan kemanusiaan dan ekonomi belaka, persoalan kemiskinan dengan berbagai dimensinya telah disadari akan dapat berdampak destruktif yang bermuara pada terjadinya instabilitas sosial, ekonomi, keamanan, hukum maupun politik. Bahkan, tak jarang mempengaruhi eksistensi dan resistensi sebuah pemerintahan baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional bahkan internasional.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang salah satu isinya adalah penyempurnaan TKPK menjadi TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang langsung diketuai oleh Wakil Presiden. Peraturan Presiden tersebut di

tindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa secara struktur langsung diketuai oleh Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah awal di samping langkah-langkah berikutnya berupa penerbitan panduan-panduan dan pelatihan-pelatihan kepada Daerah (TKPK Provinsi maupun Kabupaten/ Kota) sebagai upaya penanganan dan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian yang signifikan, salah satunya adalah capaian perkembangan prosentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang menunjukkan *trend* menurun sejak tahun 2003, dimana pada tahun 2003 tercatat sebesar 25,29 persen dan pada tahun 2014 turun menjadi 20,44 persen. Meskipun mengalami penurunan, capaian ini masih berada di atas target tujuan pembangunan nasional (RPJMN) yang menetapkan angka capaian minimal 8-10 persen.

Secara kelembagaan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010, Kabupaten Probolinggo telah membentuk TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Probolinggo melalui Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 460/414/426.12/2016. Dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010, Kabupaten Probolinggo telah menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang telah berakhir perodesasi-nya.

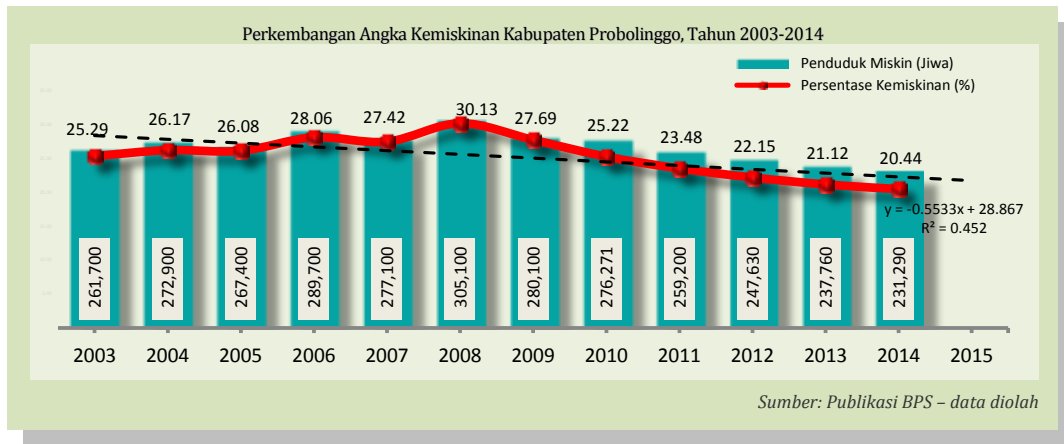
Kabupaten Probolinggo mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah pada khususnya. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar masyarakat miskin atau golongan menengah ke bawah berada di daerah pertanian (menjadi buruh tani), yang rentan terhadap situasi perekonomian yang cenderung fluktuatif. Di sisi lain program-program pemerintah daerah yang pernah disusun dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum memiliki dampak yang signifikan, sehingga Pemerintah Kabupaten Probolinggo merasa perlu untuk menyusun (kembali) dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Penyusunan dokumen SPKD, disamping sebagai langkah menyalurkan dan meng-harmonisasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, juga diharapkan arah dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dapat sejalan dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

1. Profil Kemiskinan Daerah.

Profil Kemiskinan Konsumsi,

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2003-2014, menunjukkan trend menurun.

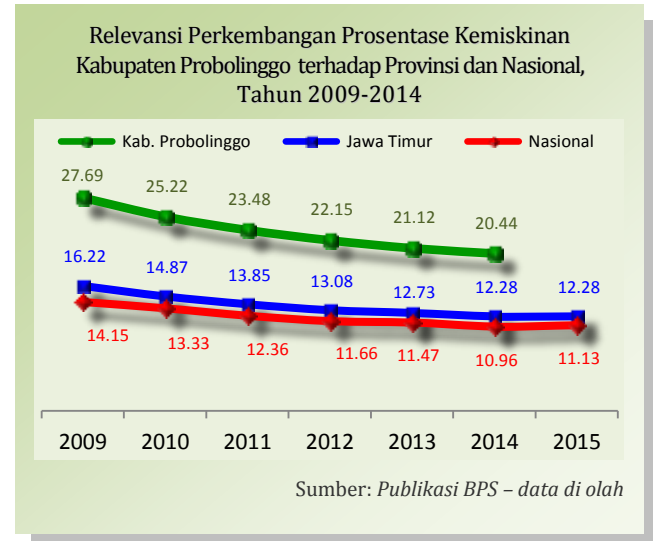
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015
(Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)



Bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun tingkat kemiskinan Nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 lebih tinggi (lebih buruk). Dan capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih jauh terhadap target RPJMN yang menetapkan angka capaian maksimal 9,00 persen.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2009-2014, relevan dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini berarti bahwa pada periode 2009-2014 upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo sejalan dalam mendukung upaya-upaya di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional dalam menurunkan angka kemiskinan.

Perspektif analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektifitas, dan relevansi terhadap perkembangan persentase dan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Probolinggo menunjukkan hasil sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.



Rangkuman Analisis Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2009-2014

		Perspektif Analisis			
		Analisis Posisi Relatif	Analisis Perkembangan Antar-Waktu	Analisis Efektifitas	Analisis Relevansi
Indikator	Persentase penduduk miskin (P_0)	Capaian tahun 2014 lebih buruk/ lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional	Selama 5 tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan trend perkembangan menurun	Trend perkembangan yg menurun selama 5 th terakhir menunjukkan efektifitas program	Perkembangan capaian 2010-2014 relevan dengan Provinsi dan Nasional.
	Jumlah penduduk miskin	Berada pada posisi 4 tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Selama 5 tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan trend perkembangan menurun	Trend perkembangan yg turun pada 5 th terakhir menunjukkan efektifitas program nangkis	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Capaian tahun 2014 lebih buruk/ lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional	Selama 5 tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan trend perkembangan menurun	Trend perkembangan yg menurun selama 5 th terakhir menunjukkan efektifitas program, meski pada tahun 2013 tidak efektif	Perkembangan capaian 2010-2014 relevan dg Provinsi dan Nasional
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	Capaian tahun 2014 lebih buruk/ lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional	Selama 5 tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan trend perkembangan menurun	Trend perkembangan yg menurun selama 5 th terakhir menunjukkan efektifitas program, meski pada tahun 2013 tidak efektif	Perkembangan capaian 2010-2014 relevan dg Provinsi dan Nasional

Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Profil Kemiskinan Non-Konsumsi (Multidimensi),

Analisis kemiskinan non-konsumsi (multidimensi) dilakukan terhadap indikator-indikator yang menjadi determinan terhadap kondisi kemiskinan yaitu indikator bidang: (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) ketenagakerjaan; (iv) infrastruktur dasar; dan (v) ketahanan pangan.

Perspektif analisis kemiskinan non-konsumsi pada indikator-indikator yang menjadi determinan terhadap kondisi kemiskinan konsumsi di Kabupaten Probolinggo berupa analisis posisi relatif dan analisis perkembangan antar waktu terhadap indikator utama pada bidang kemiskinan non-konsumsi, serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian indikator terhadap perkembangan di tingkat provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dapat ditentukan indikator-indikator yang akan menjadi prioritas / focus dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dirangkum dalam tabel berikut.

Ringkasan Hasil Analisis Kemiskinan Non-Konsumsi

Bidang / Indikator	Perspektif Analisis				
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Pendidikan:					
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 4-5 th terakhir	efektif	relevan	Bukan Prioritas
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 4-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas 2
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	fluktuatif dg trend <i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas 1
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12 th	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>tidak cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 th	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>tidak cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 th	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>tidak cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	
Angka Melek Huruf (AMH) usia 15+	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 4-5 th terakhir	efektif	relevan	Bukan Prioritas
Bidang Kesehatan:					
Angka Kematian Bayi	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	fluktuatif dg trend <i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas 2
Angka Kematian Ibu (melahirkan)	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	fluktuatif dg trend <i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas 1
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	fluktuatif dg trend <i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas 2
Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	fluktuatif dg trend <i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas 2
Bidang Ketenagakerjaan:					
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 4-5 th terakhir	efektif	relevan	Bukan Prioritas
Pekerja bekerja kurang 35 jam /minggu	<i>tidak cukup data</i>	<i>tidak cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	
Pekerja sektor informal	<i>tidak cukup data</i>	<i>tidak cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	
Bidang Infrastruk-tur Dasar:					
Proporsi Ruta dg akses	<i>lebih buruk</i> dari	<i>tidak cukup</i>	<i>tdk cukup</i>	<i>tdk cukup</i>	

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015
(Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)

Bidang / Indikator	Perspektif Analisis				
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Air Minum Layak	Provinsi tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	<i>data</i>	<i>data</i>	<i>data</i>	
Proporsi Ruta dg akses Sanitasi Layak	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membbaiki dalam 4-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas 2
Proporsi Ruta dg akses Listrik	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membbaiki dalam 4-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas 2

Bidang Ketahanan Pangan:					
Rata-Rata Harga Beras	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	
Harga Bahan Pokok Utama non Beras:					
▪ Gula pasir	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	
▪ Minyak goreng	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membbaiki dalam 4-5 th terakhir	efektif	relevan	
▪ Daging sapi lokal	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	
▪ Daging ayam ras	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	
▪ Telur ayam ras	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	
▪ Cabai merah	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	
▪ Bawang merah	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	
▪ Bawang putih	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	
▪ Jagung pipilan kering	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membbaiki dalam 4-5 th terakhir	efektif	relevan	
▪ Kedelai lokal	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	relevan	

Dari tabel di atas nampak bahwa indikator APM SMA/MA/SMK dan AKI/100.000 kh masih memiliki masalah pada posisi relatif terhadap capaian di tingkat Provinsi dan masalah pada perkembangan antar waktu (dalam 5 tahun terakhir). Sedangkan indikator-indikator yang hanya memiliki masalah pada salah satu perspektif posisi capaian yaitu posisi relatif

terhadap capaian di tingkat Provinsi atau masalah pada perkembangan antar waktu, adalah aksesibilitas air minum layak; perkembangan harga beras dan perkembangan harga bahan pokok utama lainnya. Indikator-indikator tersebut selanjutnya menjadi prioritas (focus) intervensi oleh masing-masing bidang dalam memperbaiki capaian indikatornya.

2. Determinan Kemiskinan Daerah.

Determinan Kemiskinan Konsumsi:

Aspek ketersediaan:	Aspek pemanfaatan:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum maksimal-nya jangkauan program perlindungan sosial dalam upaya melindungi pemenuhan kebutuhan penduduk yang kurang mampu, terkait layanan pendidikan, kesehatan. Infrastruktur dasar dan kebutuhan bahan pokok. ▪ Belum maksimalnya sinergitas upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab. Probolinggo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok khususnya pada rumah tangga/individu dg kondisi kesejahteraan $\leq 40\%$ terbawah di Kab. Probolinggo. ▪ Rendahnya daya saing kegiatan ekonomi, yang diakibatkan rendahnya keterampilan wirausaha, keterampilan teknis & terbatasnya akses pasar penduduk kurang mampu & rentan dalam mengatasi kompleksitas masalah kemiskinan

Determinan Kemiskinan Non-Konsumsi:

1. Bidang Pendidikan:

Aspek ketersediaan:	Aspek pemanfaatan:
<p>APM SMP/MTs:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin; ▪ $\pm 54\%$ desa di Kab. Probolinggo merupakan desa terpencil dg $\pm 33\%$ memiliki tingkat kesulitan ke SMP/MT's; ▪ belum optimalnya tata kelola pembiayaan penyelenggaraan pendidikan melalui CSR dan dana partisipasi masyarakat; ▪ ketersediaan dan kualitas sarana prasarana sekolah belum sesuai SPM Pendidikan terutama perpustakaan dan laboratorium; ▪ kebutuhan biaya operasional sekolah & cakupan BSM; ▪ distribusi Guru sesuai kebutuhan sekolah; ▪ belum tersedia dan terkelolanya data sasaran jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah (antisipasi Kartu Indonesia Pintar/KIP). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kemampuan ekonomi rumah tangga ber-akibat antara lain anak usia sekolah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga & kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti pendidikan; ▪ terdapat penduduk usia sekolah 13-15 th dg motivasi belajar/sekolah yg rendah karena faktor lingkungan pergaulan maupun budaya. ▪ terdapat anggapan di masyarakat bahwa anak yg hanya tamat SMP begitu juga SMA pada akhirnya juga bekerja sehingga lebih baik putus sekolah di SMP dibanding SMA.

<p>APM SMA/MA/SMK:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin. ▪ ±54% desa di Kabupaten Probolinggo merupakan desa terpencil dengan 2 kecamatan memiliki tingkat kesulitan ke SMA/MA sebesar 75-100%. ▪ belum optimalnya tata kelola pembiayaan penyelenggaraan pendidikan melalui CSR dan dana partisipasi masyarakat. ▪ ketersediaan dan kualitas sarana prasarana sekolah belum sesuai SPM Pendidikan terutama perpustakaan dan lab; ▪ kebutuhan biaya operasional sekolah dan cakupan BSM; ▪ Distribusi Guru sesuai kebutuhan sekolah; ▪ belum tersedia dan terkelolanya data sasaran jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah (antisipasi Kartu Indonesia Pintar/KIP). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kemampuan ekonomi rumah tangga berakibat antara lain anak usia sekolah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga & kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti pendidikan; ▪ terdapat penduduk usia sekolah 16-18 th dg motivasi belajar/sekolah yg rendah disebabkan faktor lingkungan pergaulan maupun budaya; ▪ masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa anak yang hanya tamat SMP dan begitu juga SMA pada akhirnya juga bekerja sehingga lebih baik putus sekolah di SMP dibanding SMA.
<p>2. Bidang Kesehatan:</p>	
<p>Aspek ketersediaan:</p> <p>AKB per 1.000 kh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah SDM Puskesmas dan jaringannya masih belum mencakup (tahun 2015, rasio bidan 39,79 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan 48 per 100.000 penduduk); ▪ belum semua puskesmas memiliki pelayanan PONEB; ▪ distribusi bidan desa; ▪ tingginya beban kerja tenaga medis Puskesmas di luar pelayanan kesehatan. 	<p>Aspek pemanfaatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rendahnya kemampuan orang tua (miskin) sehingga perhatian terhadap kesehatan bayi dan balita kurang menjadi prioritas dalam pembiayaan ekonomi rumah tangga; ▪ adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak; ▪ adanya budaya lebih mendahulukan kebutuhan gizi kepala keluarga terutama di daerah pedesaan; ▪ rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS termasuk pola asupan makanan bayi, terutama di daerah pedesaan, pesisir, dan desa terpencil.
<p>AKI per 100.000 kh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah SDM Puskesmas dan jaringannya masih belum mencakup (tahun 2015, rasio bidan 39,79 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan 48 per 100.000 penduduk); ▪ belum semua puskesmas memiliki pelayanan PONEB; ▪ distribusi bidan desa; ▪ Belum optimalnya penanganan komplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kondisi ekonomi keluarga dan diperparah dengan rendahnya kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan (cakupan K4). ▪ berbagai hambatan sebabkan perempuan miskin tidak sepenuhnya memahami manfaat Jampersal, program asuransi Pemerintah untuk ibu hamil dan melahirkan.

<p>kebidanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tingginya beban kerja tenaga medis Puskesmas di luar pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kasus² pernikahan dini yang diikuti kehamilan usia dini. ▪ kurangnya pengetahuan remaja ttg kesehatan reproduksi, terutama di pedesaan dan desa-desa terpencil. ▪ budaya masyarakat terutama di desa² terpencil yang tidak mendukung kesehatan ibu hamil. ▪ rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit penyerta kehamilan seperti eklamsia, pre-eklamsia, hipertensi dan jantung. ▪ adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak. ▪ adanya migrasi ibu hamil sebabkan tidak terkontrolnya riwayat pemeriksaan kehamilan.
<p>Prevalensi balita kekurangan gizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah SDM Puskesmas dan jaringannya masih belum mencukupi (tahun 2015, rasio bidan 39,79 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan 48 per 100.000 penduduk); ▪ belum meratanya program upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. 	<p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ masih banyaknya keluarga dg kondisi sosial ekonomi yg rendah. ▪ adanya budaya mendahulukan kebutuhan gizi kepala keluarga terutama di daerah pedesaan. ▪ rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS termasuk pola makan, terutama di daerah pedesaan, pesisir, dan desa terpencil. ▪ belum optimalnya penerapan pola perilaku kesehatan keluarga serta pola asuh anak.
<p>Proporsi persalinan oleh Nakes terlatih:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SDM Puskesmas dan jaringannya masih belum mencukupi (tahun 2015, rasio bidan 39,79 per 100.000 penduduk & rasio tenaga kesehatan 48 per 100.000 penduduk); ▪ distribusi bidan desa; ▪ tingginya beban kerja tenaga medis Puskesmas di luar pelayanan kesehatan. 	<p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi penentu pilihan pertolongan persalinan pada ibu melahirkan. ▪ berbagai hambatan sebabkan perempuan miskin tidak sepenuhnya memahami manfaat Jampersal, program asuransi Pemerintah untuk ibu hamil dan melahirkan.
<p>3. Bidang Ketenagakerjaan:</p>	
<p>Aspek ketersediaan:</p>	<p>Aspek pemanfaatan:</p>
<p>Tingkat Pengangguran Terbuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kebijakan pemerintah daerah & swasta belum sepenuhnya pro tenaga kerja, terlihat dari kurangnya fasilitasi akses permodalan/kredit, investasi, perijinan dan perlindungan tenaga kerja. ▪ belum kondusifnya situasi ekonomi dan politik dalam mendukung iklim investasi. ▪ masih terbatasnya ketersediaan investasi yang bersifat padat karya. ▪ belum optimalnya pengelolaan potensi wilayah dan SDA. ▪ sarana prasarana dan SDM termasuk instruktur pada Balai Latihan Kerja (BLK) 	<p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peluang kerja. ▪ rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan informasi kesempatan kerja. ▪ rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan pencari kerja berbasis kompetensi. ▪ rendahnya minat masyarakat untuk meningkatkan kompetensi; ▪ perubahan lahan pertanian menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian.

<p>belum memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyediaan dan pembinaan pelatihan/kompetensi tenaga kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. ▪ keterbatasan penyediaan lapangan kerja/lembaga penyalur kerja. 	
4. Bidang Infrastruktur Dasar:	
Aspek ketersediaan:	Aspek pemanfaatan:
<p>Akses air minum layak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ keterbatasan ketersediaan sumber air (disebabkan antara lain karena kerusakan daerah hulu, eksploitasi air tanah yang berlebihan dan konversi lahan); ▪ belum optimalnya penyediaan jaringan air (disebabkan al: oleh pembiayaan pemasangan jaringan masih mahal); ▪ belum optimalnya tata kelola penyaluran air; ▪ belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam penyediaan air yang berpihak pada masyarakat miskin; ▪ lemahnya pengawasan penggunaan air non rumah tangga. 	<p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air; ▪ meningkatnya kebutuhan air akibat bertambahnya jumlah penduduk (baik dari fertilitas maupun urbanisasi); ▪ rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketentuan teknis pengelolaan air limbah (<i>grey and yellow water</i>) terutama jarak antara resapan air pembuangan (<i>grey water</i>) dengan sumber air bersih...
<p>Akses sanitasi dasar layak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ persoalan sanitasi dasar bukan merupakan isu penting bagi kalangan politisi, pemerintah, bahkan dunia usaha; ▪ belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor yang berupaya menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak dan sehat menyebabkan penanganan masalah sanitasi kurang diatasi; ▪ keterbatasan APBD. 	<p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengetahuan penduduk (khususnya di pedesaan dan desa-desa terpencil) tentang kualitas lingkungan yang masih rendah; ▪ rendahnya masyarakat di kawasan perkotaan yg mendapatkan pelayanan sistem pembuangan air limbah (<i>sewerage system</i>); ▪ adanya budaya masyarakat (pedesaan dan desa terpencil) untuk BAB di sungai atau kebun; ▪ belum optimalnya peran Pokmas dalam pemeliharaan lingkungan permukiman.
5. Bidang Kecukupan Pangan:	
Aspek ketersediaan:	Aspek pemanfaatan:
<p>Produksi / ketersediaan bahan pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ database petani dan produksi pertanian (bahan pangan); ▪ belum optimalnya implementasi UU nomor 19 tahun 2013; ▪ permasalahan aturan tata niaga pertanian; ▪ belum optimalnya aksesibilitas (jalan, irigasi, energi, air, transportasi, pasar); ▪ belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pertanian modern spesifik lokasi oleh pemerintah dari sumber² teknologi; ▪ belum adanya kebijakan untuk menyediakan penelitian dan pengembangan pertanian; ▪ peran pemerintah belum maksimal dalam pemanfaatan tenaga ahli pertanian terutama dari lembaga riset dan teknologi. 	<p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kualitas dan kuantitas SDM pada sektor pertanian masih rendah; ▪ usaha pertanian masih kecil sekali & ter-pencar-pencar, petani masih sulit bersatu; ▪ kebutuhan ekonomi yg mendesak dalam jumlah besar, mendorong petani dengan mudah melepas aset lahan pertanian; ▪ semakin berkurangnya minat generasi muda di sektor pertanian; ▪ tawaran pekerjaan non pertanian dengan penghasilan rutin mendorong alih profesi petani.
<p>Akses sanitasi dasar layak</p>	<p>.</p>

Aspek ketersediaan:	Aspek pemanfaatan:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ belum adanya data yg pasti mengenai penduduk miskin. ▪ belum ada kebijakan untuk memberikan kompensasi kepada penduduk miskin tatkala harga pangan naik. ▪ mekanisme pengendalian distribusi kebutuhan pokok pangan (ter-utama beras); ▪ panjangnya rantai distribusi; ▪ kerancuan data warga miskin; ▪ belum memiliki program dan kebijakan yang melibatkan warga mampu dalam membantu mencukupi kebutuhan pangan bagi warga yang tidak mampu; ▪ belum optimalnya aksesibilitas (jalan, transportasi, pasar). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beras masih menjadi bahan kebutuhan makanan pokok utama. ▪ rendahnya diversifikasi pangan masyarakat. ▪ rendahnya pendapatan penduduk miskin. ▪ sikap mental (pada kelompok suku tertentu) yang merasa miskin dan harus mendapatkan bantuan semisal bantuan raskin.

3. Isu Strategis Rencana Aksi Daerah.

Isu-Isu Strategis;

(1) Isu kemiskinan konsumsi:

➤ Penyempurnaan program perlindungan sosial.

Penyempurnaan program perlindungan sosial dalam melindungi pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin, utamanya diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok untuk mengatasi terjadinya goncangan ekonomi maupun goncangan sosial.

➤ Pengurangan kesenjangan antar kelompok ekonomi.

Dalam rangka pengurangan kesenjangan antar kelompok ekonomi di-arahkan melalui peningkatan dan perluasan akses ketersediaan infra-struktur dan sarana pelayanan dasar.

➤ Peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif.

Peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif dilakukan melalui pembekalan keterampilan wirausaha, keterampilan teknis dan kemudahan akses pasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan.

(2) Isu Kemiskinan Non-Konsumsi:

Isu terhadap pemenuhan layanan hak-hak dasar:

➤ substansi: peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan.

➤ proses: melalui peningkatan kelembagaan sumber daya, sistem tata kelola dan tata laksana layanan hak-hak dasar yang berkualitas serta aspek keterjangkauan.

➤ konteks: ➤ memperhatikan keterjangkauan layanan kebutuhan dasar masya-rakat, khususnya warga miskin dan yang berkebutuhan khusus;

➤ kemajemukan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi serta adanya industrialisasi, perlu dibangun sinergi nangkis antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

(3) Isu terkait kebijakan dan kelembagaan nangkis):

➤ memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah, dan aturan pelaksanaan-nya yang secara jelas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama-nya, misalnya Perda tentang penanggulangan kemiskinan, peraturan pe-manfaatan dana bansos dalam penanggulangan

kemiskinan, peraturan yang me-wajibkan SKPD yang memiliki program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk memanfaatkan Pemutahiran Basis Data Ter-padu (PBDT) 2015 sebagai dasar acuan perencanaan program penanggulangan kemiskinan;

- melaksanakan unifikasi data kemiskinan berbasis PBDT 2015, dimana seluruh SKPD dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan memanfaatkan data tersebut sebagai dasar acuan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
- mengembangkan program-program khusus penanggulangan kemiskinan yang merupakan inovasi daerah, khususnya yang memiliki basis pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- membangun keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (*corporate social responsibility*), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media Massa melalui kemitraan dalam program/kegiatan nangkis.

Rencana Aksi Daerah;

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Perbaikan program perlindungan sosial; 2. Pengurangan kesenjangan antar kelompok ekonomi; 3. Peningkatan daya saing ekonomi produktif;	Menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2022.	Menurunnya tingkat kemiskinan dari 20,44 pada tahun 2014 menjadi 12,82 - 7,52 pada tahun 2022		Prosentase penduduk miskin	20,44% (2014)	16,63-13,98	15,68-12,37	14,73-10,75	13,77-9,14	12,82-7,52	12,82-7,52		
			1) Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat Miskin: ▪ Bantuan biaya sekolah anak tidak sekolah pada PBDT 2015; ▪ Penyuluhan pada orang tua anak tidak sekolah pada PBDT 2015; ▪ Bantuan biaya pendampingan operasional sekolah.	Jumlah anak tidak sekolah usia 7-18th berdasar PBDT 2015 (=26.847 orang)	-	50% APB D CRS	75% APB D CRS	75% APB D CRS	100% APBD CRS	100% APBD CRS	100%	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial	
			2) Program Peningkatan Akses Kesehatan Masyarakat Miskin: ▪ Pembiayaan jaminan kesehatan individu dg penyakit kronis PBDT 2015;	Jumlah individu dg penyakit kronis (PBDT 2015)	-	100% APB D CRS	100% APB D CRS	100% APB D CRS	100% APBD CRS	100% APBD CRS	100%	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penangungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				=13.179 orang)									
			3) Program Peningkatan Akses Sani-tasi dan Air Bersih bagi Rumah Tangga Miskin: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan air bersih pd rumah tangga dg sumber air tidak terlindungi PBDT 2015. ▪ Kampanye ttg pengelolaan sumber & penyediaan air bersih. 	Jumlah ruta dg sumber air tdk terlindungi ber-dasar PBDT 2015 (=32.000 ruta)	-	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	100%	Dinas PU, Dinas Kesehatan	
			▪ Penyediaan jamban rumah tangga bagi ruta tanpa fasilitas BAB dan SPAL pada PBDT2015.	▪ Ruta tanpa fasilitas BAB berdasar PBDT2015 (106.415 ruta)	-	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	100%	Dinas Kesehatan, Dinas PU	
			▪ Peningkatan ke-mampuan masya-rakat dlm penyediaan sanitasi lingkungan.	▪ Ruta tanpa fasilitas SPAL berdasar PBDT2015 (160.890 ruta)	-	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	20% APBD D CSR	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana sanitasi berbasis komunitas. 										
			3) Program Peningkatan Akses Berusaha Masyarakat Miskin: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan keterampilan pd angkatan kerja muda yg belum bekerja agar memiliki kemampuan bekerja & berusaha. ▪ Penyediaan modal UMKM. ▪ Pendampingan usaha 	Individu usia 15-45th yang tidak bekerja berdasar PBDT 2015 (±99.000 orang)		10% APB D CSR	10% APB D CSR	10% APB D CSR	10% APBD CSR	10% APBD CSR	100%	Dinas Tenaga kerja, Dinas Sosial, Dinas koperasi,	
			4) Program Peningkatan Akses Perumahan Masyarakat Miskin: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki rumah tidak layak huni pd PBDT 2015. ▪ Penyusunan/penyempurnaan pedoman perbaikan RTLH. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruta dgn rumah tanpa lantai ubin/kayu kualitas tinggi (127.775 ruta) ▪ Ruta dg rumah dg dinding selain tembok/plesteran 	-	20% APB D CSR	20% APB D CSR	20% APB D CSR	20% APBD CSR	20% APBD CSR	100%	Dinas PU	
					-	20% APB D CSR	20% APB D CSR	20% APB D CSR	20% APBD CSR	20% APBD CSR	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				(67.647 ruta) ▪ Ruta dg rumah dg atap selain genteng/asbes /seng (351 ruta)	-	100% APB D CSR	-	-	-	-	100%		
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan lahan untuk pemukiman warga miskin, ▪ Penyediaan rumah sewa bagi warga miskin. ▪ Pengembangan subsidi perumahan mau pun sitem pembiayaan <i>social housing</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruta tanpa status penguasaan lahan tempat tinggal (PBDT 2015 = 1.977 ruta) ▪ Ruta tanpa status penguasaan bangunan tempat tinggal (698 ruta) 	-						100%	Dinas	
			5) Program Peningkatan Akses Listrik bagi Masyarakat Miskin:	▪ Ruta dgn tempat tinggal							100%	Dinas	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			listrik desa. ▪ Pengembangan energi baru & terbarukan serta konservasi energi.	tanpa listrik berdasar PBDT 2015 (1.265 ruta)									
			6) Program rintisan <i>Desa Melangkah</i> : ▪ Kajian & penyusunan pedoman; ▪ Membangun kerja-sama dg PT & Perbankan; ▪ Sosialisasi & pendampingan.	--	--	100 desa	-	-	-	-	100%	BPMD	
4. Mengembangkan sistem Unifikasi Data Kemiskinan Kabupaten. 5. Memperkuat Sekretariat TKPK. 6. Membangun parti-sipasi masyarakat dan kelompok peduli	Memperkuat kelembagaan TKPK	TKPK berjalan sesuai peran dan fungsi sebagaimana Permendagri No.42 - 2010.											
			1) Program Unifikasi Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan: ▪ <i>Updating</i> data PBDT 2015. ▪ Kajian dan Penyusunan <i>wealth ranking poverty</i> PBDT 2015, ▪ Kajian tingkat Kesejahteraan rumah tangga &	- - -	- - -	1x 1x 1x	1x	1x	1x	1x	100% 100%	Pokja data TKPK: ▪ Bappeda ▪ BPS	
						1x					100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			individu berbasis PBDT 2015, ▪ Kajian Pendidikan & kesehatan berbasis PBDT 2015, ▪ Kajian Ketenaga-kerjaan berbasis PBDT 2015, ▪ Kajian Infrastruktur dasar berbasis PBDT 2015.	-	-	1x					100%		
			2) Program Kesekretariatan: ▪ Penyediaan ruang TKPK yg representatif. ▪ Pengadaan sarana sistem informasi data kemiskinan ▪ Penyediaan tenaga/ staf kesekretariatan	-	-	1					100%	Sekretariat TKPK: ▪ Sekda ▪ Bappeda	
			3) Program Kemitraan:										
			▪ Kajian pola pembinaan hubungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam kemitraan Nangkis. ▪ Penyusunan direktori lembaga usaha dan industri yang siap melakukan kemitraan (CSR), ▪ Penyusunan direktori pokmas (miskin dan perempuan) yang siap bermitra,	-	-	1x APB D					100%	Pokja Kemitraan TKPK	
				-	-	1x APB D		1x APB D		1x APBD	100%		
						1x APB D		1x APB D		1x APBD	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan naskah MoU dan Perjanjian kerjasama dg PT, ▪ Penyusunan naskah MoU dan Perjanjian kerjasama dg Media, ▪ Penyusunan naskah MoU dan Perjanjian kerjasama dg Pengelola CSR, 			1x APB D					100%		
						1x APB D					100%		
						1x APB D					100%		
			4) Program PPM:			1					100%	Pokja Pengaduan Ma-syarakat TKPK	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan SOP, ▪ Penyiapan sarpras PPM (form PPM, PO Box, website dll) ▪ Pengeolaan PPM 			1	1	1	1	1	100%		
			5) Program Klaster 1:			APB D	APB D	APB D	APBD APBD	APBD APBD	100%	Pokgram Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan pada PKH, ▪ Dukungan program Raskin. 			APB D	APB D	APB D	APBD APBD	APBD APBD	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinsos ▪ Dinkes 	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan <i>home-care</i>, <i>daycare</i> pd lansia miskin, 	Jumlah lansia (60 th ke atas) PBDT 2015 = 77.824 orang	-	100% APB D CSR	100% APB D CSR	100% APB D CSR	100% APBD CSR	100% APBD CSR	100%		
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan disabilitas miskin 	Jumlah disabilitas PBDT 2015 = 6.693 orang									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			6) Program Klaster 2: ▪ Dukungan program KOTAKU (next PNPM MPk) dan program nasional lainnya. ▪ Program Desa Melangkah ▪ Program Pengembangan Destinasi Wisata.	Jumlah desa wisata	-	APB D	APB D	APB D	APB D	APB D	100%	Pokgram Bantuan So-aial berbasis Pemberdayaan Masy.	
			7) Program Klaster 3: ▪ Program Penem-patan Modal Daerah dlm rang-ka mendukung program KUR ▪ Program Pember-dayaan Koperasi. & UMKM: - Penyusunan database, - Penyusunan konsep pengembangan dan bintek skema pendanaan bagi UMK - Peningkatan kapasitas LMKBB, - Sosialisasi peluang akses kredit/pembiayaan bank melalui <i>linkage</i> . - Pendampingan KUMKM dan IKM	Presentase tersedianya anggar an penjaminan KUR	-	100% APB D	100% APB D	100% APB D	100% APBD	100% APBD		Pokgram Pember-dayaan Masyarakat berbasis UMKM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program (outcome), Target Kinerja Kegiatan (output) dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode SPKD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			8) Program Klaster 4: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembi-naan & pengem-bangan Infrastruk-tur dasar dan per-mukiman. ▪ Program Pengem-bangan & Penge-lolaan Perikanan Tangkap, ▪ Program Pengelo-laan Sumber Daya Laut dan Pesisir, ▪ ▪ 									Pokgram Lain-Lain.	

4. Indikator Monitoring (Capaian Kinerja).

Capaian kinerja percepatan penanggulangan kemiskinan dalam strategi penanggulangan kemiskinan (SPKD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2022 diindikasikan dari hasil capaian masing-masing indikator dengan batasan-batasan capaian sebagaimana tabel berikut:

Indikator Utama SPKD serta Penanggungjawab Utama

Bidang	Indikator	Target	Penanggung jawab
Kemiskinan Konsumsi	Jumlah penduduk miskin	Sesuai % kemiskinan	Bappeda
	Prosentase penduduk miskin (P ₀)	12,82 – 7,52 (2022)	
	Indeks kedalaman kemiskinan (P ₁)	2,5	
	Indeks keparahan kemiskinan (P ₂)	menurun	
Bidang Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
	Laju Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	meningkat	
	Rasio pekerja bekerja kurang dari 35 jam per-minggu	menurun	
	Proporsi tenaga kerja sektor informal	menurun	
Bidang Pendidikan	Angka partisipasi murni (SD/SLTP/SLTA)	100%	Dinas Pendidikan;
	Angka melek huruf penduduk usia 15+	100%	
	Angka putus sekolah (usia 7-18 th)	0%	
Bidang Kesehatan	Angka kematian bayi (AKB)	23 /1.000 kh	Dinas Kesehatan; BPPKB
	Angka kematian balita (AKBa)	32 /1.000 kh	
	Angka kematian Ibu (KI)	102/100.000 kh	
	Prevalensi balita kekurangan gizi	15%	
	Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100%	
Bidang Infrastruktur Dasar	Akses rumah tangga terhadap air minum layak	100%	Dinas PU Cipta Karya; Dinas Kesehatan
	Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	100%	
	Rasio elektrifikasi	100%	
	Proporsi kepemilikan hak atas rumah/tempat tinggal	Meningkat	
	Proporsi rumah tidak layak huni	Menurun	
Bidang Ketahanan Pangan	Penduduk dengan asupan kalori >2.000 kkal perkapita per-hari	meningkat	Dinas Pertanian; Dinas Peternakan dan Perikanan; Badan Ketahanan Pangan dan PPP
	Perkembangan harga beras	menurun	
	Perkembangan harga kebutuhan pokok non-beras	menurun	

Pada akhirnya semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan, demikian juga kemitraan antar Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam suksesnya penerapan Strategi Penanggulangan Kemiskinan ini, dan sekaligus untuk pencapaian tujuan pembangunan millenium. Dan tidak kalah pentingnya, untuk dapat melakukan analisis kondisi/capaian indikator-indikator yang menjadi determinan kondisi kemiskinan sehingga diperoleh hasil pemetaan prioritas bidang intervensi dan penetapan prioritas wilayah intervensi dengan tepat, maka pemenuhan data dan informasi terkait pada seluruh kecamatan menjadi suatu keniscayaan dan senantiasa ter *up date*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013, Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar – Riskesdas 2013, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2011, Definisi Operasional Indikator MDG's, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2011, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2012, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2013, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2014, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2015, Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2015, Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2015, Statistik Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015, Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2015, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014, Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015, Surabaya.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Statistik Harga Perdagangan Besar Komoditi Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2015, Surabaya
- Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2015, Profil Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015, Probolinggo.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2015, Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015, Probolinggo
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2011, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, Surabaya.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2012, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, Surabaya.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2013, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, Surabaya.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2014, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Surabaya.
- Ivanovich Agusta, 2011, Keterampilan Penelitian Kuantitatif - Teori, Kerangka Pemikiran, Definisi Operasional, Indikator Pengukuran, Kumpulan Kuesioner, Bogor.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin, Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011, Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011, Panduan Penanggulangan Kemiskinan - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan kedua, Mei 2011, Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2014, Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.
- Tim Sekretariat Pembina TKPK Provinsi dan Kota/Kabupaten Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, 2011, Pedoman Penyusunan SPKD, Jakarta.
- _____, <http://bps.go.id>
- _____, <http://jatim.bps.go.id>
- _____, <http://probolinggakab.bps.go.id>
- _____, <http://siskaperbapo.com>